EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR DALAM KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Farhan Maulana
NPP. 29.1068
Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: farhanmaulana2799@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This study was conducted to determine the Effectiveness of Apparatus Performance in Work From Home Policy at the Department of Population and Civil Registration of DKI Jakarta Province.* ***Purpose:*** *The purpose of this study was to determine the factors that hinder the effectiveness of Apparatus Performance in the Work From Home Policy at the DKI Jakarta Provincial Population and Civil Registration Office and the solutions implemented to overcome the existing obstacles.* ***Methods:*** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, data collection techniques with interviews, observations and documentation studies.* ***Results****: The results of this study are the Effectiveness of Apparatus Performance in the Implementation of Work From Home (WFH) at the Department of Population and Civil Registration of DKI Jakarta Province has been effective in quality although in quantity according to the Covid-19 outbreak and the impact of the outbreak resulted in changes services that were originally manual are now online.* ***Conclusion:*** *The Effectiveness of Apparatus Performance in the Implementation of Work From Home (WFH) at the Department of Population and Civil Registration of DKI Jakarta Province, the assessment consists of four aspects, namely: Work results, Behavior, Attributes and competencies, and Comparative, although currently happening pandemic, but this does not affect the results of the work, but there is a decrease in quantity due to Work From Home. The behavior of the employees at the Service did not experience any setbacks because they had carried out their duties with responsibilities and carried out periodic evaluations.*

Keywords: Effectiveness, Performance, Work From Home

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Kebijakan Work From Home di pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang menjadi faktor penghambat efektivitas Kinerja Aparatur dalam Kebijakan Work From Home di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta serta solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. **Hasil:** Hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sudah efektif secara kualitas walaupun dalam kuantitas menurun dikarenakan adanya wabah Covid-19 dan dampak dari wabah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pelayanan yang awalnya secara manual sekarang menjadi online. **Kesimpulan:** Efektivitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, penilaian tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu : Hasil kerja, Perilaku, Atribut dan kompetensi, dan Komperatif, walaupun pada saat ini sedang terjadi pandemi, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hasi pekerjaan tersebut, namun adanya penurunan kuantitas dikarenakannya Work From Home. Perilaku pegawai pada Dinas tersebut tidak mengalami kemunduran dikarenakan mereka sudah menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab dan dilakukannya evaluasi secara periodik.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, Work From Home

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil atau PNS adalah setiap warga negara Republik yang memenuhi persyaratan yang kemudian di angkat oleh pejabat yang berwenang dan di tugaskan pada jabatan pemerintah atau di tugaskan pada suatu jabatan di negara dan di beri upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat dalam Pasal 1 di sebutkan bahwa fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.

Pemerintahan memiliki fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Fungsi dari perlindungan kepada masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram, dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling dasar dari pemerintahan karena hasilnya merupakan prasyarat bagi bekerja dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Ditengah Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu, ketika pemerintah menerapkan WFH "work form home", tentunya memiliki banyak pertimbangan dan acuan dasar dalam memutuskan kebijakannya. Namun, banyak faktor yang menghambat kinerja ASN dalam metode kerja ini. Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 serta Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran CoronaVirus Disease sebagai Bencana Nasional.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Melihat data penambahan pasien positif virus corona yang terus menunjukan peningkatan setiap harinya, pemerintah DKI Jakarta mengambil keputusan untuk memutus berbagai rantai klaster mulai dari pariwisata, hiburan, pendidikan dan perkantoran. Perkantoran menjadi pusat perhatian dikarenakan sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penyebaran virus Covid-19. Pemberlakuan work from home (WFH) atau sistem bekerja dari rumah adalah salah satu dari sekian metode yang digunakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Hal penting menjadi catatan dalam penerapan kebijakan ini yaitu penyesuaian dan adaptasi pegawai pada sektor pemerintahan yang dituntut untuk mampu menguasai dan mengoperasikan teknologi. Selain itu, hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kualitas kinerja. Stablitas kerja dari pegawai sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini. Kebijakan WFH tentunya akan mengubah kondisi lingkungan kerja pegawai yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja pegawai. Salah satu hal dinilai krusial yaitu motivasi yang menjadi penyalur, penyebab, serta pendorong dari periIaku individu sehingga mempunyai berkemauan untuk antusias dan bekerja keras untuk memenuhi hasil kerja yang optimaI

1.3. Penelitian Terdahulu

Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Masa Pandemic Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Peneliti Alifbatatsarel Andra Jihad Panghegar, dkk (2021) Masalah 1. Sejak diberlakukannya work from home pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menurunkan kualitas pelayanan. 2. Banyak instansi yang membatasi dalam melakukan pelayanan dan membatalkan urusan atau kepentingan diluar dinas menjadikan tidak efektifnya kinerja dari instansi tersebut. Metodepenelitian kualitatif deskriptif Kesimpulan Disdukcapil Kabupaten Sleman mengubah sistem pelayanan menjadi online yang meminimalisir

adanya kontak langsung dengan masyarakat. Meskipun telah memberikan pelayanan online tetapi masyarakat menganggap bahwa cara tidak memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen. Optimalisasi Kinerja Aparatur Sipil Negara terhadap Sistem Shift Kerja sebagai Dampak dari Pandemi Covid19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Peneliti Siti Nur Azizah, dkk (2021) Masalah 1. Kurang nya jaminan kesehatan dan keselamat kerja saat pandemi covid-19 2. Sulitnya koordinasii antara atasan dan bawahan Metode Metode penelitian kualitatif Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian terkait kinerja ASN dalam pelaksanaan sistem baru yaitu shift kerja sebagai dampak pandemi nasional Covid-19 dapat kita ketahui bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan tunjangan kerja, Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, reward pegawai teladan, koordinasi dukungan dari atasan dan peningkatan pelayanan, sosialisasi dan inovasi. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Stain Mandailing Natal Dimasa Pandemi Covid-19 Peneliti Muhlisah Lubis, dkk (2021) Masalah 3. kurang efektifnya perkuliah daring kepada mahasiswa 4. beberapa dosen tidak mahir dalam menjalankan aplikasi zoom ada nya sistem shift Metode Metode penelitian kualitatif Kesimpulan Dosen mengatakan sistem baru pembelajaran Daring belum efektif karena sulitnya penyampaian materi dan mempunyai batasan dalam mengawasi secara keseluruhan keaktifan mahasiswa di dalam perkuliahan daring berlangsung. Selain itu, Terdapat beberapa dosen yang belum mampu untuk menggunakan aplikasi zoom dan google meet sehingga perkuliahan daring di laksanakan hanya lewat via Whatshapp (WA), dan dosen keberatan dengan sistem shift dikarenakan ada capaiancapaian yang harus di capai menjadi terlambat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja pada saat pandemi covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kinerja pegawai dalam kebijakan WFH pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan induktif. Selain itu penulis menggunakan pengumpulan data informasi menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Data yang terkumpul penulis analisis dengan mereduksi data kemudian menyajikan data dan yang terakhir menarik kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Pengukuran Kinerja Moeheriono (2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Capaian kinerja merupakan salah satu intrumen untuk mengukur optimalitas kerja suatu organisasi secara kolektif sehingga dapat dievaluasi dan dikembangkan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Negeri dalam pelaksanaan

Work From Home (WFH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Moeheriono (2014) mengatakan bahwa terdapat faktor penilaian dalam mengukur kinerha pegawai. Adapun penilaian tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu: 1) Hasil kerja; 2) Perilaku; 3) Atribut dan kompetensi; serta 4) Komperatif.

a. Hasil Kerja

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tetap berjalan dimasa pandemi Covid-19. Adapun sistem pelayanan yang mereka lakukan ialah dengan membatasi jumlah layanan dan personil yang bekerja di kantor agar tidak terjadi kerumunan massal. Selanjutnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan fasilitas pengajuan permohonan secara daring demi mengurangi aktivitas penduduk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

b. Perilaku

Perilaku kerja, motivasi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengalami kemunduran atau penurunan. Hal ini dikarenakan sistem evaluasi berkala yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan secara periodik membuat displin pegawai menjadi dapat terjaga sehingga dapat mengontrol perilaku apartur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

c. Atribut dan Kompetensi

Dapat diketahui bahwa pernyataan dari pihak pimpinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesaksian atau fakta yang dialami oleh pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Para pegawai mengaku bahwa mereka paham dan tau ranah kerja dan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan dampak dari kebiasaan yang berulang dalam pekerjaan dan juga kerap diingatkan oleh para pimpinan terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

d. Komperatif

Maka dapat diketahui bahwa para responden yang terdiri dari pimpinan hingga staf yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa secara umum tingkat pengetahuan dan tindakan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dengan baik sehingga hal ini akan sangat berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam menjalankan Kebijakan Work From Home (WFH) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

3.2 Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Work from Home (WFH)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat beberapa faktor penghambat kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan publik pada pelaksanaan WFH di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ialah sebagai berikut:

1) Dampak pandemi Covid-19 yang membuat laju pelayanan terganggu dan membuat sistem pelayanan menjadi berubah, yakni yang semula offline menjadi online.
2) Penyesuaian pegawai terhadap perubahan mekanisme kerja WFH yang sangat mengedepankan penggunaan IPTEK dalam 77 setiap kegiatannya.
3) Fasilitas penunjang WFH. Seperti akses internet, gawai atau sarana penunjang kerja lainnya sehingga dapat mengoptimalkan kinerja di tengah kebijakan WFH yang diberlakukan
4) Pembatasan jumlah pegawai yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah atau kuantitas dari hasil kerja

3.3 Upaya yang Dilakukan untuk Menangani Faktor Penghambat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Work from Home (WFH)

1) Menerapkan sistem pengajuan pelayanan kependudukan secara online demi menekan mobilitas dan kerumunan penduduk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan adanya pelayanan melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui hhtps://kependudukancapil.jakarta.go.id/ sehingga dapat mengurangi kerumunan dan angka penyebaran kasus Covid-19.

2) Menghimbau setiap pegawai untuk lebih dekat dengan teknologi serta membatu pegawai yang kesulitan dalam menggunakan teknologi dengan melakukan sosialisasi atau pengarahan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3) Menyesuaikan target kinerja dengan suasana pandemi sehingga kebijakan WFH menjadi lebih realistis untuk dijalankan dan agar dapat berjalan lebih efektif dan maksimal sesuai dengan keadaan yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di DKI Jakarta diatur melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 938 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Selain menutup tempat wisata, rekreasi, dan tempat hiburan, Gubernur DKI Jakarta juga melarang kegiatan yang menghasilkan kerumunan atau keramaian, termasuk di fasilitas publik dan taman kota. Selain itu, masyarakat juga di himbau untuk tetap berada di rumah dan tidak berpergian kecuali dalam keadaan yang mendesak atau beraktivitas dalam sektor/ usaha esensial.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, penilaian tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu : Hasil kerja, Perilaku, Atribut dan kompetensi, dan Komperatif, walaupun pada saat ini sedang terjadi pandemi, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hasi pekerjaan tersebut, namun adanya penurunan kuantitas dikarenakannya Work From Home . Perilaku pegawai pada Dinas tersebut tidak mengalami kemunduran dikarenakan mereka sudah menjalankan tugas mereka dengan

tanggung jawab dan dilakukannya evaluasi secara periodik. Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Work from Home (WFH) ialah dampak pandemi Covid-19 sistem pelayanan menjadi berubah, yakni yang semula offline menjadi online, penyesuaian pegawai terhadap perubahan mekanisme kerja WFH, Fasilitas penunjang WFH, dan pembatasan jumlah pegawai.Upaya yang Dilakukan untuk Menangani Faktor Penghambat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Work from Home (WFH), yaitu dengan menerapkan sistem pengajuan pelayanan kependudukan secara online, menghimbau setiap pegawai untuk lebih dekat dengan teknologi, dan menyesuaikan target kinerja dengan suasana pandemi.

Keterbasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya mengambil data dari informan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan juga mengambil data dari survei pendapat masyarakat mengenai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan staff yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Azizah, Siti.” Optimalisasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Terhadap Sistem Shift Kerja Sebagai Dampak Dari Pandemi COVID-19 Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Jurnal Respon Publik, Vol. 15, No. 10, Tahun 2021, Hal: 74-81

Lubis, Muhlisah.” Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Stain Mandailing Nata di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.6, No. 1, Januari 2021.

Panghegar, Alifbatatsarel.” Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Masa Pandemic Covid-19. Jurnal Pemerintahan dan

Kebijakan (JPK), Vol 2, No 2 (2021): Desember Hal. 53-59.

UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran CoronaVirus Disease sebagai Bencana Nasional.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956